



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 15 Juni 2022

Halaman: 2

## TERAS

### Laporan Publik

PEMKOT Yogyakarta membuka pintu laporan publik setelah ditangkapnya mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Keduanya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat suap dalam izin apartemen di dekat Malioboro. Pemkot dengan senang hati menerima setiap laporan yang masuk untuk memperbaiki layanan.

Ditangkapnya Haryadi Suyuti jelas membuat geger warga Kota Yogyakarta. Wali Kota dua periode tersebut dijemput KPK hanya berselang sekitar 10 hari usai lengser pada 22 April 2022. Ironis karena di bawah kepemimpinannya, Kota Yogyakarta langganan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta penghargaan bergensi nasional lainnya. Haryadi gagal lulus hanya gara-gara suap perizinan.

Pemkot Yogyakarta yang kini dikendalikan Penjabat Wali Kota, berusaha tetap fokus pada pelayanan. Penjabat yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024 harus mampu merapatkan barisan para aparaturnya. Setiap ASN yang dilantik dan diambil sumpahnya harus menjunjung tinggi pakta integritas, untuk menjauhi korupsi, kolusi dan nepotisme. Sudah banyak kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret pejabat daerah, sehingga kasus tersebut membuat mereka jera.

Laporan publik ini sangat berguna bagi pemerintah daerah. Laporan bisa berupa kritik, masukan, atau bahkan laporan mendesak yang berkaitan dengan lembaga atau personal. Klasifikasi laporan ini bisa diteruskan oleh lembaga atau organisasi perangkat daerah yang dituju untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki. Setiap laporan yang masuk harus diikuti dengan bukti yang kuat.

Pemkot Yogyakarta memiliki aplikasi Jogja Smart Service (JSS) yang di dalamnya banyak sekali layanan pemerintahan dan fitur aduan. Selama ini aduan yang diketahui masyarakat hanya seputar informasi wisatawan atau perpajakan atau PKL yang sering nuthuk pengunjug. Namun dengan adanya fitur laporan yang lebih luas, mungkin saja masukan tentang upaya pencegahan bisa ditampung. \*\*\*-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005